

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil tinjauan atas kesesuaian pengelolaan Barang Milik Negara terhadap konsep *green economy* pada satker di wilayah KPPN Madiun, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Kelangkaan sumber daya alam yang ada di Indonesia merupakan salah satu sinyal bumi kepada manusia untuk bersikap lebih bijak terhadap eksploitasi sumber daya alam. Kesadaran masyarakat terhadap krisis iklim dan pencermaran lingkungan harus ditanamkan sejak dini. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan beberapa kebijakan kepada masyarakat supaya lebih sigap terhadap perubahan lingkungan. Ditetapkannya berbagai kebijakan mulai dari Surat Edaran hingga terbitnya Tap MPR sangatlah berperan dalam penurunan emisi karbon di Indonesia. Guna mendukung keefektifan kebijakan-kebijakan tersebut, diperlukan *role model* yang dekat dengan masyarakat, seperti instansi pemerintah.

Keberadaan instansi pemerintah bisa memotivasi masyarakat umum untuk lebih bijak dalam penggunaan energi. Hal yang bisa dilakukan oleh instansi pemerintah adalah dengan menerapkan upaya dukungan pelestarian lingkungan dan konservasi energi yang efektif pada instansi pemerintah. Dengan begitu, pemerintah lebih mudah memberikan gambaran penghematan energi kepada masyarakat.

Upaya dalam mendukung *Green Economy* bisa dilakukan melalui penerapan *Green Asset* pada pengelolaan Barang Milik Negara. Pengelolaan Barang Milik Negara yang baik dan tepat akan menghasilkan keluaran yang baik dan tepat. Begitu juga apabila pengelolaan barang milik negara memenuhi indikator *Green Asset* dan mendukung perwujudan *Green Economy*, maka output yang dihasilkan juga akan sesuai dengan indikator tersebut. Beberapa hal yang berhubungan dengan Barang Milik Negara dan bisa diupayakan oleh instansi pemerintah adalah dengan efisiensi penggunaan listrik, efisiensi pemanfaatan air, efisiensi penggunaan kertas, efisiensi penggunaan kendaraan bermotor atau kendaraan dinas, dan memperhatikan pengelolaan gedung dan bangunan perkantoran.

2. KPPN Madiun sebagai KPPN percontohan telah memenuhi kriteria hemat energi yang dibuktikan dengan perhitungan energi pada sampel pendingin ruangan. Perhitungan tersebut dilakukan melalui metode observasi lapangan dan wawancara kepada salah satu staff KPPN Madiun. Dalam penghematan air, KPPN Madiun juga telah melakukan upaya penghematan air dengan cara menggunakan air tanah yang dipompa menggunakan pompa air sebagai alat penyediaan sumber energi air di KPPN Madiun. KPPN Madiun juga memberikan himbauan terkait penghematan energi yang ditempelkan di dinding toilet dan dekat benda elektronik. Terkait upaya *paperless*, KPPN Madiun berusaha memanfaatkan ulang kertas yang tidak terpakai untuk mencetak dokumen-dokumen informal. Hal ini sangatlah baik karena KPPN Madiun bisa

memanfaatkan kembali kertas yang tidak terpakai sehingga mendukung penghematan kertas.

Kendaraan operasional di KPPN Madiun juga dirawat dan diservis secara rutin. Penggunaan energi bahan bakar pada kendaraan operasional KPPN Madiun juga sangat diperhitungkan. Hanya ada satu kendaraan yang menggunakan bahan bakar Pertamina, sedangkan sisanya menggunakan bahan bakar Pertalite. Disamping pengelolaan kendaraan operasional, pengelolaan gedung dan bangunan juga merupakan hal yang harus diperhatikan. Berdasarkan beberapa indikator *greenship* dari *Green Building Council Indonesia*, ada beberapa indikator yang belum bisa dipenuhi oleh KPPN Madiun yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Akan tetapi, bila ditinjau secara umum gedung dan bangunan perkantoran KPPN Madiun sudah mendukung upaya *Green Economy* dari sisi *Green Asset*.

KPKNL Madiun juga merupakan salah satu unit vertikal Kementerian Keuangan di Kota Madiun. Dalam upaya mendukung *Green Economy*, KPKNL juga memberlakukan pengelolaan barang milik negara berbasis *Green Asset*. Hal ini dibuktikan dengan adanya monitoring berkala yang nantinya laporan tersebut disampaikan ke kanwil DJKN Jawa Timur. Salah satu hal yang dimonitoring pada laporan tersebut adalah terkait penghematan energi listrik. Secara perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2012 dengan menggunakan sampel pendingin ruangan, KPKNL telah memenuhi skor efisiensi penggunaan energi listrik. Selain itu, terkait pemanfaatan air, KPKNL Madiun juga telah berupaya untuk mendaur ulang air

di selokan atau saluran pembuangan air untuk penyiraman tanaman. Air di saluran pembuangan air tersebut berasal dari air hujan yang dialirkan ke saluran pembuangan.

Kendaraan dinas di KPKNL Madiun rata-rata mengalami rusak ringan. Namun demikian, perawatan rutin tetap dilakukan oleh KPKNL Madiun. Hal ini dikarenakan semua kendaraan yang ada di KPKNL Madiun selalu dipakai sehingga perawatannya harus dilakukan dengan baik. Bahan bakar yang digunakan adalah Pertalite, kecuali untuk kendaraan dinas dengan merk Panther yang berbahan bakar solar. Terkait gedung dan bangunan, indikator yang digunakan sama dengan KPPN Madiun, yaitu menggunakan beberapa indikator dari GBCI versi kedua. Hasilnya, hampir mirip dengan KPPN Madiun dimana tidak semua indikator bisa dipenuhi oleh KPKNL Madiun dikarenakan beberapa faktor. Akan tetapi, secara umum pihak manajemen KPKNL Madiun berusaha untuk mendukung upaya penghematan energi di lingkungan KPKNL Madiun.

3. Walaupun perwujudan *Green Economy* terlihat mudah, namun faktanya terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi oleh instansi pemerintah. Mulai dari letak geografis, kondisi lingkungan sekitar, hingga kompetensi sumber daya manusia yang harus diperhatikan lebih lanjut. Apabila disepelekan, maka hal ini akan berdampak pada gagalnya program *Green Economy* dari segi *Green Asset* di lingkungan instansi pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukannya perhatian lebih terhadap tantangan dan hambatan yang telah dan akan terjadi di

masa depan supaya terwujudnya *Green Economy* di instansi pemerintahan, terutama di lingkungan satuan kerja wilayah KPPN Madiun.